

**ORIENTASI POLITIK PEMILIH PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014****Ratih Puspa Yunita <sup>✉</sup>, Sugiyarta Stanislaus**

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

**Info Artikel***Sejarah Artikel:*

Diterima Agustus 2014  
Disetujui September 2014  
Dipublikasikan Oktober 2014

*Keywords:*

*Political Orientation of  
Voters, Legislative's  
Elections.*

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah orientasi politik pemilih dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif prosentase, dengan sampel penelitian berjumlah 400 orang pemilih yang diambil secara acak dari delapan kecamatan di Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi yang paling banyak digunakan dalam memilih calon legislatif adalah berdasarkan identifikasi terhadap partai (27,5%) dan pendapat evaluatif (25,2%). Faktor lain seperti peristiwa personal, citra sosial, faktor emosional, munculnya kandidat baru, dan paternalistik tokoh agama secara mayoritas merupakan orientasi dalam kategori sedang. Sedangkan pada faktor yang berhubungan dengan visi misi dan program kerja ternyata mayoritas tergolong rendah. Orientasi politik pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 di Kabupaten Kebumen secara keseluruhan sudah mengarah kepada orientasi positif (59,2%). Orientasi positif bermakna bahwa orientasi-orientasi politik yang terdiri dari tiga dimensi utama yaitu dimensi kognitif, afektif, dan evaluatif memiliki tingkat orientasi yang tinggi, dengan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap objek politik.

**Abstract**

*This research aimed to determine what's political orientation of voters in legislative's election year 2014. This research is a descriptive quantitative procentase, which took sample amount to 400 voters. The result showing that the most used orientation in chosing a legislative candidates are partai identification (27,5%) and an evaluative oppinion (25,2%). Majority, on the othe factors like personal event, social image, emotional factor, new candidate, and the paternalistic of religious leaders are classified in medium class. While in vision mission factor also the work programs are classified in low class. Overall, political orientation of voters in Legislative's Election Year 2014 in Kebumen Regency aimed to possitive orientation (59,2%). Possitive orientation have meaning that all of political orientation which is kognitive, affective, an evaluative orientation are high, with high awareness frequency, high feeling, and possitive evaluation to political object.*

## PENDAHULUAN

Pemilu adalah bagian penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pemilu secara sederhana diartikan sebagai kontrak politik antara warga dan orang atau partai politik dalam melakukan aktivitas politik, yang mana orang tersebut diberikan wewenang atau mandat untuk melaksanakan sebagian kekuasaan rakyat/ pemilih.

Pemilihan (*elections*), sering dipandang sebagai jantung dari proses politik "*the heart of the political process*". Pemilihan juga merupakan lambang, sekaligus tolok ukur dan implementasi dari prinsip-prinsip demokrasi. Pada awal penerapan prinsip demokrasi, lembaga *legislatif* memiliki posisi yang strategis dan sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin tentang kedaulatan rakyat serta kedaulatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini didasarkan kepada suatu pandangan bahwa bukan hanya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saja yang mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk mengungkapkan kedaulatan rakyat (*will of the people*) dalam bentuk Undang-Undang (UU). (Amal, 1996 dalam Sitepu, 2012: 215).

Memang bukan sesuatu yang mudah dalam pelaksanaan pemilu di Negeri ini, melibatkan lebih dari 150 juta pemilih, yang dalam 1 hari pemilihan, pemilih harus memilih empat pejabat publik yaitu: anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, sebagai sarana utama penentuan anggota parlemen yang mewakili kepentingan rakyat, seharusnya pemilu hanya dapat diikuti oleh peserta yang dianggap kredibel oleh rakyat, sehingga efektivitas kompetensi dapat dipelihara. Terlalu banyak calon yang akan dipilih, dengan latar belakang sosial dan politik yang beragam pula akan menyebabkan orientasi politik yang beragam pula. Orientasi politik itulah yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku pemilih untuk menentukan keputusan memilih atau tidak memilih seorang kandidat anggota dewan legislatif di negeri ini.

Berdasarkan pendekatan perilaku yang dikemukakan Budiharjo (dalam Sitepu, 2012: 17)

bahwa proses politik yang terjadi pada suatu negara akan lebih bisa diketahui apabila kita fokus pada rakyat sebagai pelaku politik dibandingkan dengan membahas lembaga-lembaga politik formalnya. Perilaku politik hanyalah sebagian dari perilaku sosial yang berhubungan erat dengan pola perilaku pemberian suara terhadap Rancangan Undang-Undang, giat tidaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memelopori kegiatan untuk Rancangan Undang-Undang (RUU), bagaimana interaksinya dengan teman-teman sejawat, kegiatan "*lobbying*", juga terkait dengan orientasinya terhadap kegiatan-kegiatan seperti sikap, persepsi, motivasi, evaluasi, tuntutan, harapan-harapan, dan sebagainya.

Sikap diterjemahkan terhadap objek tertentu terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap perasaan. Sikap juga disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap objek yang ada. Dalam hal ini sikap bisa diterjemahkan sebagai kesediaan bereaksi terhadap suatu hal dan senantiasa terarahkan kepada sesuatu hal atau objek. Dalam hubungannya dengan perilaku dan nilai, sikap dapat mempengaruhi perilaku yang diarahkan pada objek, orang, dan atau situasi tertentu. Sementara nilai dapat mewakili keyakinan yang dapat mempengaruhi perilaku pada setiap situasi. Dengan demikian, sikap dan nilai sering kali berada dalam keserasian, dalam hubungannya dengan perilaku. Lebih dari itu dikatakan bahwa komponen kognitif, afektif, dan konatif menentukan sikap, dan sebaliknya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perilaku merupakan suatu akumulasi aktivitas kognitif, afektif, dan konatif dari dalam diri individu. Dengan demikian sikap menjadi cikal bakal sekaligus penggerak seseorang untuk berperilaku baik positif maupun negatif.

Perilaku memilih (*to vote*) biasa dikaitkan dengan perilaku politik, karena memilih dalam hal ini artinya memilih wakil rakyat melalui kegiatan politik, yaitu pemilu. Menurut Prihatmoko, perilaku memilih dan partisipasi politik adalah dua hal yang tak terpisahkan

dalam diskusi Pemilu. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Partisipasi politik juga menyangkut hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sedangkan perilaku pemilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan, yaitu menjawab pertanyaan apakah warga masyarakat menggunakan hak pilih atau tidak? Apakah memilih partai X atau Y? Serta alasan mengapa memilih partai X atau Y (Prihatmoko, 2008:46). Orientasi yang mendasari perilaku pemilih adalah orientasi politik.

Kata "orientasi" itu sendiri berarti suatu peninjauan untuk menentukan sikap (arah,tempat,dsb) yang tepat dan benar, atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, dan kecenderungan untuk bersikap (www.KBBI.online.com). Sedangkan orientasi politik merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat dalam melakukan suatu aktivitas politik. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu objek politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang.

Almond dan Verba (1984:231) mengutarakan sebuah tipologi yang menjelaskan mengapa seseorang menggunakan hak pilihnya, yaitu disebabkan oleh tiga orientasi politik: (1) orientasi kognitif, yakni pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. (2) Orientasi afektif, yakni perasaan terhadap sistem politik, peranan, keberadaan aktor dan penampilannya, (3) orientasi evaluatif, yakni keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan (keputusan untuk memilih atau tidak memilih salah satu kandidat).

Adapun angka partisipasi pemilih dalam pemilihan umum (Pemilu) di Kabupaten Kebumen terhitung sejak Pilgub tahun 2004, dikutip dari [www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com) hingga Pilpres tahun 2009 makin menurun. Data KPU Kabupaten Kebumen menunjukkan angka partisipasi pemilih pada Pilgub tahun 2004 mencapai 82,51% sementara pada tahun 2009 hanya mencapai 67,89%. Sementara angka partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004 putaran I mencapai 79,69% dan putaran II menurun 9,02 hingga 10,37%. Kondisi serupa juga terjadi pada angka partisipasi Pilbup 2010 putaran I mencapai 63,08% serta putaran II 57,11% atau terjadi penurunan sebesar 8,73%-14,70%.

Menurunnya angka partisipasi politik dan meningkatnya jumlah pemilih *golput* sangatlah memprihatinkan. Menurut Sekretaris KPU Kabupaten Kebumen Bambang Budi Hartoko, berdasarkan angket KPU yang disebarakan ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada PilBup 2010, dari angka ketidakhadiran pemilih sebagian besar alasan sedang merantau (70,08%). Diurutan kedua karena sudah lanjut usia (6,75), tidak bisa meninggalkan pekerjaan (6,02%) serta sebab lain-lain sebesar 17,14%.

Fenomena *golput* yang besar di Kabupaten Kebumen inilah yang mendorong peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai orientasi politik masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku politik masyarakat untuk memilih atau tidak memilih seorang kandidat peserta pemilu.

Berdasarkan studi pendahuluan pada masyarakat di Kabupaten Kebumen yang sudah berpartisipasi dalam pemilu, didapatkan hasil bahwa alasan mereka memilih calon legislatif tidak sepenuhnya merupakan hasil pemikiran rasional mengenai kandidat atau partai politik tertentu, melainkan hanya didasarkan pada suatu "keterpaksaan" untuk tetap memilih salah satu kandidat atau partai politik tertentu. Meskipun tidak begitu mengenal kandidat yang diusung, kepercayaan terhadap suatu partai tetap bisa dijadikan landasan individu untuk

menentukan pilihan kepada suatu kandidat peserta pemilu.

Beragamnya orientasi yang melatarbelakangi perilaku pemilih di Kabupaten Kebumen inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai orientasi politik yang mempengaruhi keputusan politik pemilih dalam menentukan pilihan terhadap calon kandidat dalam pemilu Legislatif. Pada Penelitian yang berjudul "Orientasi Politik Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Kebumen" ini, peneliti terfokus pada Pemilu Legislatif karena pada fase pemilu inilah yang paling "membingungkan" bagi para pemilih untuk berperilaku, memutuskan untuk memilih atau mungkin tidak memilih seorang kandidat yang diusung.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan dianalisis dalam bentuk prosentase dengan menggunakan satu variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel orientasi politik.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *cluster sampling*. *Cluster sampling* digunakan jika sumber data atau populasi sangat luas (Sugiyono, 2005:31). Sampel daerah diambil secara acak dengan menggunakan metode *incidental sampling*, atau diperoleh secara kebetulan ditemui peneliti pada saat pengambilan data dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 8 kecamatan dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen, yaitu kecamatan Prembun, Alian, Kebumen, Pejagoan, Sruweng, Kutowinangun, Karanganyar, dan Gombang dengan total responden sebanyak 400 orang.

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah skala orientasi politik. Instrumen disusun berdasarkan penskalaan model Likert dengan menggunakan alternatif jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Penelitian ini merupakan hasil kajian ilmiah tentang orientasi pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Kebumen.

### Uji Coba Instrumen

Dalam penelitian ini skala penelitian diujicobakan terlebih dahulu terhadap subjek uji coba yang memiliki karakteristik yang sama dengan subjek penelitian. Uji coba instrumen dilakukan

di Kecamatan Kebumen terhadap 50 orang yang ditemui secara *incidental*. Skala yang telah diisi kemudian diolah untuk mengetahui validitas dan reliabilitas skala orientasi politik.

Berdasarkan uji validitas, diperoleh bahwa skala orientasi politik yang terdiri dari 51 item terdapat 31 item yang valid dan 20 item tidak valid. Item yang valid dalam skala orientasi politik mempunyai koefisien validitas antara 0,474 sampai dengan 0,824 dengan taraf signifikansi 5%. Setelah melakukan pengkajian, item yang tidak valid kemudian dibuang dan item yang valid kemudian dijadikan instrumen penelitian. Uji reliabilitas skala diperoleh koefisien reliabilitas 0,814. Skala tersebut dinyatakan reliabel dalam kategori tinggi karena koefisien reliabilitas mendekati 1,00 (Azwar, 2003:112).

### Orientasi Politik Pemilih

Orientasi politik pemilih di Kabupaten Kebumen secara umum tergolong dalam orientasi positif yaitu sebanyak 59,2% dari total responden. Orientasi positif menurut Almond (1984:234) merupakan bentuk orientasi yang menunjukkan indikasi yang tergolong tinggi, baik pengetahuan, frekuensi kesadaran, perasaan, dan evaluasi positif mengenai politik dan pemilu itu sendiri sehingga menghasilkan tingkat partisipasi memilih yang tinggi pula.

Berdasarkan pengumpulan data di lapangan, ditemukan bahwa orientasi politik

pemilih pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Orientasi Kognitif ,yakni pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan output politik seorang kandidat. Pada orientasi kognitif ditemukan bahwa:

Visi misi dan program kerja. Sebanyak 54,8% pada kategori rendah; 33,7% pada kategori sedang; dan 11,5% pada kategori tinggi.

Prestasi dan *track record*. Sebanyak 29,8% pada kategori rendah; 58,7% pada kategori sedang; dan 11,5% pada kategori tinggi.

Orientasi Afektif, yakni perasaan terhadap sistem politik, peranan, keberadaan aktor dan penampilannya. Pada orientasi afektif ditemukan bahwa:

Citra sosial. Sebanyak 21,5% pada kategori rendah; 68,3% pada kategori sedang; dan 10,2% pada kategori tinggi.

Faktor emosional. 19,5% pada kategori rendah; 65,8% pada kategori sedang; dan 14,7% pada kategori tinggi.

Muncul caleg baru. 18,3% pada kategori rendah; 68,2% pada kategori sedang; dan 13,5% pada kategori tinggi.

Orientasi evaluatif merupakan orientasi yang ditandai dengan keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Pada orientasi evaluatif ditemukan bahwa:

Identifikasi partai. 5,3% pada kategori rendah; 67,2% pada kategori sedang; dan 27,5% pada kategori tinggi.

Paternalistik tokoh agama. 41,3% pada kategori rendah; 55% pada kategori sedang; dan 3,7% pada kategori tinggi.

Pendapat evaluatif. 14,5% pada kategori rendah; 60,3% pada kategori sedang; dan 25,2% pada kategori tinggi.

## PEMBAHASAN

Dalam konteks perilaku politik, hal yang dipikirkan dan diinginkan berkaitan erat dengan orientasi politik. Orientasi politik itu sebenarnya merupakan cara pandang tentang politik yang

kemudian mendasari masyarakat untuk melakukan aktivitas politik yang dalam penelitian ini merupakan aktivitas memilih calon legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil penelitian, orientasi politik yang paling banyak digunakan adalah berdasarkan orientasi evaluatif, terutama aspek identifikasi partai (27,5%) dan pendapat evaluatif (25,2%). Kategori tinggi berarti bahwa responden sebagai pemilih sudah benar-benar secara sadar dan penuh keyakinan dalam menentukan pilihan mereka berdasarkan orientasi tersebut.

Secara spesifik, dalam orientasi kognitif yang terdiri dari aspek isu dan kebijakan politik bukanlah dasar pemilih dalam memilih seorang calon legislatif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pada aspek visi misi dan program kerja, mayoritas responden (54,8%) berada dalam kategori rendah dengan jumlah responden dalam kategori tinggi sebesar 11,5%. Kategori rendah berarti bahwa pemilih tidak memiliki pengetahuan dan kepercayaan terhadap isu-isu kebijakan dan visi misi yang dipaparkan calon legislatif selama masa kampanye.

Pada aspek prestasi dan *track record* caleg, mayoritas responden berada dalam kategori sedang (58,7%) dengan 11,5% responden berada dalam kategori tinggi. Kategori sedang berarti bahwa pemilih masih ragu dan belum mengerti tentang isu-isu kebijakan politik serta visi misi yang dipaparkan calon legislatif.

Tak jauh berbeda dengan aspek prestasi dan *track record* caleg, pada aspek citra sosial, mayoritas responden terdapat pada kategori sedang (68,3%) dengan 10,2% responden pada kategori tinggi. Aspek faktor emosional dengan mayoritas responden berada pada kategori sedang (65,8%) dengan 14,7% responden pada kategori tinggi. Aspek munculnya caleg baru, mayoritas responden pada kategori sedang (68,2%) dengan 13,5% pada kategori tinggi.

Berdasarkan teori perilaku, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya dan akan selalu terkait dengan pengetahuan ,sikap, dan nilai seseorang terhadap objek sosial

yang kemudian membentuk afeksi tertentu. Beberapa faktor yang mendasari afeksi pemilih untuk memilih adalah citra sosial, faktor emosional, dan munculnya caleg baru. Pada aspek citra sosial, mayoritas responden berada dalam kategori sedang (68,3%) dengan 10,2% pada kategori tinggi. Hal tersebut berarti bahwa faktor kesamaan sosiologis sangat kecil pengaruhnya terhadap perilaku memilih seseorang. Berbeda dengan citra sosial, perasaan instingtif tentang kandidat justru lebih mendasari pemilih dalam memilih calon legislatif. Hal itu terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 14,7% responden berada pada kategori tinggi, itu artinya lebih besar daripada aspek citra sosial.

Aspek terakhir yang seringkali menimbulkan perasaan instingtif adalah munculnya caleg baru dalam pemilihan. Rasa keingintahuan yang tinggi terhadap kredibilitas caleg baru yang relatif lebih muda cenderung lebih menarik perhatian pemilih. Aspek ini mendasari orientasi pemilih sebesar 13,5% responden pada kategori tinggi. Yang artinya lebih berpengaruh dibandingkan aspek citra sosial.

Orientasi evaluatif merupakan orientasi yang ditandai dengan keputusan dan pendapat-pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Berdasarkan pendapat Nursal (2004:72) faktor-faktor yang dapat dikategorikan menjadi orientasi evaluatif adalah identifikasi terhadap partai, pengaruh tokoh agama, dan pendapat evaluatif tentang politik dan sistem politik di Indonesia.

Sejarah demokrasi di Indonesia menyatakan bahwa terdapat era Orde Baru yang ditandai dengan adanya 3 partai besar yang berkuasa pada saat itu. Hal itu kemudian berpengaruh pada perolehan suara yang cenderung masih tinggi terhadap ketiga partai tersebut, yaitu PDI, Golkar, dan PKB. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 27,5% responden berada dalam kategori tinggi. Itu artinya, aspek identifikasi partai merupakan

orientasi yang paling banyak mendasari pilihan masyarakat.

Aspek selanjutnya yang merupakan orientasi terbanyak adalah berdasarkan pendapat evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 25,2% responden berada dalam kategori tinggi. Hal tersebut berarti bahwa pemilih masih banyak yang memiliki pendapat evaluatif yang positif terhadap politik dan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Sistem pemerintahan tradisional yang masih berlaku dalam beberapa daerah di Kabupaten Kebumen merupakan salah satu aspek yang masih melandasi orientasi politik masyarakat. Sistem pemerintahan tersebut adalah tipe pemerintahan paternalistik. Paternalistik merupakan tipe kepemimpinan kebapakan dimana tokoh pemimpin yang mampu mengajari, mengayomi, dan memberi contoh baik terhadap masyarakat akan lebih disegani pendapatnya.

Tokoh yang menjadi pemimpin dilukiskan dalam sosok pemuka agama yang disegani. Akan tetapi aspek ini tidak terlalu mendasari pilihan pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya sebesar 3,7% saja yang berada pada kategori tinggi, 41,3% pada kategori rendah, dan 55% pada kategori sedang. Hal tersebut berarti bahwa banyak pemilih yang sudah tidak memperhatikan faktor *kebapakan* dalam tokoh agama dalam kehidupan bermasyarakat. Tokoh agama bukan lagi dianggap sebagai panutan utama yang seluruh pendapat dan arahan merupakan hal yang harus dilakukan, termasuk dalam memilih calon legislatif.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Secara umum orientasi politik yang paling banyak dimiliki oleh pemilih pada pemilu legislatif di Kabupaten Kebumen adalah berdasarkan faktor identifikasi partai.

Berdasarkan orientasi kognitif pemilih, Mayoritas pemilih memiliki tingkat orientasi

berdasarkan visi misi dan program kerja yang rendah dan dengan kategori tinggi sebesar 11,5%, sedangkan mayoritas pemilih memiliki tingkat orientasi berdasarkan prestasi dan *track record* yang sedang dan dengan kategori tinggi sebesar 11,5%.

Berdasarkan orientasi afektif pemilih, mayoritas pemilih memiliki tingkat orientasi berdasarkan citra sosial calon legislatif dengan kategori sedang dan kategori tinggi sebesar 10,2%; tingkat orientasi berdasarkan faktor emosional terhadap calon legislatif dengan kategori sedang dan kategori tinggi sebesar 14,7%; dan tingkat orientasi berdasarkan munculnya calon legislatif baru dengan kategori sedang dan kategori tinggi sebesar 13,5%.

Berdasarkan orientasi evaluatif pemilih, mayoritas pemilih memiliki tingkat orientasi berdasarkan identifikasi terhadap partai dengan kategori sedang dan dengan kategori tinggi sebesar 27,5%; mayoritas tingkat orientasi berdasarkan pengaruh paternalistik tokoh agama dengan kategori sedang dan kategori tinggi sebesar 3,7%; serta mayoritas tingkat orientasi berdasarkan pendapat evaluatif sedang dan dengan kategori tinggi sebesar 25,2%.

Beberapa faktor individual yang mendorong pemilih untuk memilih seorang calon legislatif antara lain adalah jenis kelamin responden, usia responden, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan responden.

### Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang berjudul "Orientasi Politik Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Kebumen" maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa, hendaknya dapat lebih mengangkat isu-isu spesifik yang sedang marak terjadi dalam dunia politik di Indonesia, misalkan isu pencitraan, *black campaign*, dan lain sebagainya. Selain itu hendaknya peneliti lebih memperhatikan jumlah sebaran item dengan jumlah yang sama tiap aspek dalam penyusunan instrumen penelitian. Hal ini bertujuan agar didapat hasil penelitian yang lebih valid.

Bagi pemilih di Kabupaten Kebumen, melihat rendahnya orientasi kognitif dibandingkan orientasi lainnya, pemilih diharapkan untuk dapat dengan lebih cerdas dan rasional dalam mempertimbangkan calon legislatif mana yang lebih pantas untuk dipilih. Bukan hanya berdasarkan partai politik yang mengusungnya saja, melainkan juga harus memperhatikan faktor kemampuan calon legislatif itu sendiri, baik dari visi misi dan program kerja yang ditawarkan. Dan juga mempertimbangkan *track record* dan prestasi-prestasi calon legislatif yang mungkin dapat mendukung kredibilitas calon legislatif tersebut bila terpilih menjadi wakil rakyat kita.

### DAFTAR PUSTAKA

- Almond. A. G dan Verba. 1984. Budaya Politik Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ananta, A., N.A. Evy., dan Suryadinata. 2004. Indonesian Electoral Behaviour. A Statistical Perspective. Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies.
- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik edisi Revisi. Jakarta: PT Rineka Pustaka.
- Azwar, S. 2003. Reliabilitas dan Validitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Azwar, S. 2004. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar.
- Azwar, S. 2011. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Edisi ke-2, Cetakan XV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Cholisin dan Nasiwan. 2005. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press.
- Dwiwibawa, R. dan Riyanto, T. 2008. Latihan Dasar Kepemimpinan. Yogyakarta: Kanisius.
- Fauzi, M. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif. Semarang: Walisongo Pers.
- Fibrianti, Nurul. 2011. Matematika Pemilukada Dan Penguatan Demokrasi Lokal. Jurnal Konstitusi, Vol. III, No. 1, Juni. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Firmanzah. 2007. Marketing Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gaffar, A. 2006. Politik Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Myers, D.G. 2012. Psikologi Sosial 1. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nimmo, D. 2001. Komunikasi Politik Khalayak dan Efek. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nursal, A. 2004. Politik Marketing Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan
- Prasetyo, B., dan Jannah, L.M. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Prihatmoko, J.J. 2008. Mendemokratiskan Pemilu. Dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sarwono, J. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sarwono, S.W. 2006. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiajid dan Puji, L. 2012. Pengaruh Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah; Studi Pilkada Pada Masyarakat Pemilih di Kab.Pati. Jurnal FIS Sosial Vol.37 No.2. Universitas Negeri Semarang
- Setiajid dan Ulfaizah. 2004. Pengaruh Interaksi Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Tengguli Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara. Jurnal FIS Sosial Vol. 20 No.1. Universitas Negeri Semarang.
- Setiajid. Orientasi Politik Yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010. Jurnal Integralistik No.1/Th.XXII/2011, Januari-Juni 2011.
- Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sitepu, P.A. 2012. Studi Ilmu Politik. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2005. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, R. 1999. Memahami Ilmu Politik . Jakarta: PT. Grasindo
- Syah Putra, D.K. 2012. Media dan Politik, Menemukan Relasi Antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tim Penyusun UNNES. 2008. Panduan Penulisan Karya Ilmiah. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Ummatin, K. 2002. Perilaku Politik Kiai. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [www.seputar.indonesia.com/node/13792](http://www.seputar.indonesia.com/node/13792)
- <http://kbbi.web.id/orientasi>
- (<http://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/page/index/23>)
- [http://www.pikiranrakyat.com/node/134429/\(06/02/2011\)](http://www.pikiranrakyat.com/node/134429/(06/02/2011))